SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DALAM MERESPONS STATUS PEMERINTAHAN YANG TIDAK DIAKUI SECARA INTERNASIONAL TAHUN 2021-2023

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

Dani Oneldy
NIM. E1111201031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DALAM MERESPONS STATUS PEMERINTAHAN YANG TIDAK DIAKUI SECARA INTERNASIONAL TAHUN 2021-2023

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

Dani Oneldy
NIM. E1111201031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DALAM MERESPONS STATUS PEMERINTAHAN YANG TIDAK DIAKUI SECARA INTERNASIONAL TAHUN 2021-2023

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Dani Oneldy
NIM. E.1111201031

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si
NIP. 197408102002122002

Tanggal 28 Juni 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Dewi Suratiningsih, S.IP., MA
NIP. 198609142019032005

Tanggal 4 Juni 2025

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DALAM MERESPONS STATUS PEMERINTAHAN YANG TIDAK DIAKUI SECARA INTERNASIONAL TAHUN 2021-2023

Oleh:
Dani Oneldy
NIM. E.1111201031

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang 3 FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si	Dewi Suratiningsih, S.IP., MA
NIP. 197408102002122002	NIP. 199504242022032029

Penguji Utama	Penguji Pendamping
a.n	
Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si	Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I
NIP. 197611302003122000	NIP. 199504242022032029

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons status pemerintahan yang tidak diakui secara internasional pada periode 2021–2023. Sejak kembali berkuasa pada 2021, pemerintahan Taliban tidak mendapatkan pengakuan resmi dari komunitas internasional karena dianggap belum memenuhi sejumlah syarat, seperti pemerintahan inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak perempuan, serta kepatuhan terhadap norma global. Kondisi ini mengakibatkan isolasi diplomatik, pembatasan akses terhadap forum internasional, sanksi global, dan krisis ekonomi yang serius. Untuk merespons situasi tersebut, Taliban menerapkan kebijakan luar negeri dengan memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama dengan negara-negara yang bersikap pragmatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Analisis penelitian ini mengacu pada teori *Foreign Policy Decision-Making* oleh Richard Snyder, yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan yang terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Taliban dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang otoriter, dinamika antar faksi, opini publik sebagai indikator stabilitas, serta kondisi geografis yang strategis. Di sisi lain, tidak adanya pengakuan internasional dan isolasi global mendorong Taliban mengadopsi strategi adaptif dengan memanfaatkan dinamika dunia multipolar dan memperkuat kerja sama ekonomi regional sebagai cara untuk memperoleh legitimasi dan mengatasi tekanan global.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri Afghanistan, Pengakuan, Rezim Taliban

ABSTRACT

This study aims to explain the factors influencing Afghanistan's foreign policy under the Taliban regime in response to its unrecognized status in the international community during the period of 2021–2023. Since regaining power in 2021, the Taliban government has not received official recognition from the international community, as it is deemed to have failed in meeting several key conditions, including the establishment of an inclusive government, respect for human rights particularly women's rights and compliance with global norms. This situation has led to diplomatic isolation, restricted access to international forums, the imposition of global sanctions, and a severe economic crisis. In response, the Taliban has implemented a foreign policy strategy aimed at strengthening diplomatic relations and enhancing economic cooperation, particularly with countries that adopt a more pragmatic stance. This research employs a qualitative approach with an explanatory design and uses documentation as the primary data collection technique. The analysis is based on Richard Snyder's Foreign Policy Decision-Making theory, which emphasizes that foreign policy is shaped through decision-making processes influenced by both internal and external factors. The findings indicate that the Taliban's foreign policy is driven by internal factors such as an authoritarian government structure, intra-factional dynamics, public opinion as an indicator of stability, and Afghanistan's strategic geographic location. Externally, the absence of international recognition and diplomatic isolation has prompted the Taliban to adopt adaptive strategies, including leveraging the dynamics of a multipolar world and strengthening regional economic cooperation as a means to gain legitimacy and navigate global pressures.

Keywords: Afghanistan Foreign Policy, Recognition, Taliban Regime

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "*Analisis Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dalam Merespons Status Pemerintahan yang Tidak Diakui secara Internasional Tahun 2021-2023*". Judul penelitian ini diambil karena fenomena kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat pada 2021 telah menimbulkan dinamika internasional yang kompleks. Pemerintahan Taliban tidak memperoleh pengakuan resmi dari sebagian besar negara, dan hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana strategi kebijakan luar negeri pemerintah Taliban dibentuk dalam menghadapi isolasi diplomatik. Isu ini menarik secara akademik karena menyangkut hubungan antara legalitas internasional, pengakuan negara, dan diplomasi dalam sistem global kontemporer

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan drastis dalam tatanan politik Afghanistan pasca-2021, yang berdampak pada hubungan luar negeri negara tersebut. Di tengah ketidakpastian pengakuan internasional, pemerintah Taliban tetap menjalankan aktivitas luar negeri untuk mempertahankan eksistensinya sebagai aktor negara. Situasi ini menciptakan ketegangan antara keinginan Taliban untuk diterima secara internasional dan tuntutan global.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal memengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons status pemerintahan yang tidak diakui secara internasional tahun 2021- 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Taliban, serta

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusannya. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoretis dalam studi hubungan internasional, khususnya mengenai pengakuan negara dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dengan memperoleh data melalui laporan resmi, pernyataan diplomatik, serta sumber-sumber sekunder dari jurnal dan media internasional.. Analisis penelitian ini mengacu pada teori *Foreign Policy Decision-Making* oleh Richard Snyder, yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan yang terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kondisi domestik dan tekanan lingkungan global membentuk respons diplomatik pemerintahan Taliban.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban periode 2021–2023 merupakan respons strategis terhadap tidak diakuinya pemerintahan mereka secara internasional. Kebijakan tersebut dibentuk oleh kombinasi faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam teori *Foreign Policy Decision-Making* oleh Richard Snyder. Dari sisi internal, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang otoriter dan tersentralisasi, dinamika internal antar faksi Taliban, serta opini publik yang meskipun tidak dilibatkan secara langsung, tetap diperhitungkan sebagai indikator stabilitas. Selain itu, kondisi geografis Afghanistan yang strategis namun terkurung

daratan mendorong Taliban menjalankan diplomasi yang pragmatis dan berorientasi pada kerja sama regional.

Di sisi eksternal, ketiadaan pengakuan internasional menyebabkan isolasi diplomatik dan pembatasan akses formal, yang mendorong Taliban mengadopsi strategi adaptif dengan membangun hubungan ekonomi dan diplomasi terbatas dengan negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Taliban berfokus pada menjaga kekuasaan, membangun legitimasi, dan memanfaatkan peluang regional tanpa bergantung pada pengakuan resmi dari komunitas internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Taliban membentuk pemerintahan yang lebih inklusif untuk mengurangi tekanan internasional dan meningkatkan legitimasi. Komunikasi yang lebih terbuka serta perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk peran perempuan, juga penting untuk memperkuat dukungan domestik. Selain itu, posisi geografis Afghanistan perlu dimanfaatkan melalui kerja sama ekonomi regional.

Dari sisi eksternal, negara dan organisasi internasional diharapkan tetap membuka dialog dan kerja sama teknis di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan ekonomi. Pendekatan bertahap melalui hubungan fungsional dapat mendorong penyesuaian Taliban terhadap norma internasional tanpa pengakuan formal. Penelitian lanjutan perlu dikembangkan dengan fokus pada pendekatan kawasan dan diplomasi non-konvensional untuk memahami peran aktor non-demokratis dalam tatanan global multipolar.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dani Oneldy

Nomor Mahasiswa : E1111201031

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 3 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



(Dani Oneldy)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"If Allah helps you, none can defeat you. But if He denies you help, then who else can help you? So in Allah let the believers put their trust.."

(Q.S. Ali Imran: 160)

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan, khususnya dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Darlis** dan Ibu **Uray Rusdiana**, yang dengan penuh kasih senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah dan perjuangan. Kepada kedua kakak saya, **Dea Oselga** dan **Deo Osendy** atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan moril yang tak pernah putus selama proses ini berlangsung. Kepada keluarga besar, atas kepedulian dan dukungan yang tiada henti. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, kebersamaan, serta motivasi yang sangat berarti dalam melewati setiap fase perjalanan akademik ini. Dan kepada diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran, keteguhan, dan usaha yang terus dijaga meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang berjudul: ‘Analisis Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dalam Merespons Status Pemerintahan yang Tidak Diakui secara Internasional Tahun 2021-2023’’. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP. M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Penguji Utama.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional.

5. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan penelitian ini.
6. Dewi Suratiningsih, S.IP., MA., selaku pembimbing pendamping skripsi, atas masukan dan kritik konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan naskah ini.
7. Annisa Dina Amalia, S.Sos., M.I.R., selaku pembimbing proposal, atas saran dan panduan berharga pada tahap awal penelitian ini.
8. Dr. Elyta, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa studi
9. Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I., selaku Dosen Penguji Pendamping.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pembantu Dekan, serta staf Tata Usaha dan Akademik FISIP Universitas Tanjungpura yang telah mendukung penulis selama proses perkuliahan.
11. Seluruh rekan mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, yang telah menjadi sumber semangat, dukungan moral, dan kebersamaan selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan ilmiah dalam studi hubungan internasional.

Pontianak, Juli 2025

Dani Oneldy
NIM. E.1111201031

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 13
1.3. Fokus Penelitian 14
1.4. Rumusan Masalah 14
1.5. Tujuan Penelitian 15
1.6. Manfaat Penelitian 15
1.6.1. Manfaat Teoritis 15
1.6.1. Manfaat Praktis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
2.1. Definisi Konsep 17
2.1.1. Kebijakan Luar Negeri 17
2.1.2. *Recognition of Governments* 19
2.1.3. Komunitas Internasional 22
2.2. Teori *Foreign Policy Decision-Making* 23
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 29
2.4. Alur Pikir Penelitian 33

2.5. Pertanyaan Penelitian 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1. Jenis Penelitian 37
3.2. Langkah-langkah Penelitian 39
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 41
3.4. Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 43
3.5. Teknik Pengumpulan Data 43
3.6. Instrumen Pengumpulan Data 45
3.7. Analisis Data 46
3.7.1. Keabsahan Data 46
3.7.2. Teknik Analisis Data 47
BAB IV GAMBARAN UMUM 49
4.1. Profil Afghanistan 49
4.2. Sejarah Taliban 52
4.3. Sistem Politik dan Pemerintahan Islamic Emirate of Afghanistan (2021-2023) 55
4.4. Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di bawah Rezim Taliban pada Periode Pertama (1996-2001) dan Periode Kedua (2021-2023) 60
4.4.1. Konteks Politik dan Internasional 60
4.4.2. Tujuan dan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri 62
4.4.3. Hubungan Diplomatik dan Ekonomi 65
4.4.4. Perbandingan Hasil dan Tantangan 68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
5.1. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Islamic Emirate of Afghanistan dalam Merespons Status Pemerintahan yang Tidak Diakui 72
5.2. Pengaruh Faktor Internal Setting terhadap Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban 87
5.2.1. Pengaruh Politik Domestik terhadap Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban 88
5.2.2. Pengaruh Opini Publik terhadap Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban 100

5.2.3. Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban 109

5.3. Pengaruh Faktor External Setting terhadap Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Afghanistan di Bawah Rezim Taliban 119

BAB VI PENUTUP.....131

6.1. Simpulan 131

6.2. Saran.....133

6.3. Keterbatasan Penelitian.....134

DAFTAR PUSTAKA.....136

LAMPIRAN.....154

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1. Sikap Komunitas Internasional terhadap Pengakuan Pemerintahan Taliban di Afghanistan 3

4.1. Transformasi Bendera Afghanistan 50

4.2. Tokoh-tokoh Utama Pemerintah IEA 56

5.1. Negara-negara yang Berpartisipasi dalam Pertemuan Diplomatik dengan Pemerintah Taliban 76

5.2. Penyerahan Surat Kepercayaan oleh Duta Besar IEA, Bilal Karimi kepada Hong Lei, Direktur Jenderal Departemen Protokol Kementerian Luar Negeri Tiongkok 78

5.3. Kinerja Ekspor Produk-produk Afghanistan pada 2016-2023 81

5.4. Peta Saluran Pipa Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) 83

5.5. Pembangunan Infrastruktur Proyek CASA-1000 di Nowshera, Pakistan 84

5.6. Protes dari Warga Perempuan Afghanistan terhadap Kebijakan Pembatasan Taliban, Kabul, 2021 101

5.7. Jumlah Aksi Demonstrasi serta Intervensi Taliban pada Aksi Demonstrasi yang Melibatkan Perempuan pada 2021-2023 102

5.8. Peta Wilayah dan Batas Negara Afghanistan 110

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1. Alur Pikir Penelitian.....34

3.1. Waktu Penelitian.....42

DAFTAR SINGKATAN

1.	AHRDO	: *Afghanistan Human Rights And Democracy Organization*
2.	CAPEIC	: *Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co.*
3.	CASA-1000	: *Central Asia-South Asia Electricity Transmission and Trade Project*
4.	IEA	: *Islamic Emirate of Afghanistan*
5.	IMF	: *International Monetary Fund*
6.	NATO	: *North Atlantic Treaty Organization*
7.	PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
8.	TAPI	: *Turkmenistan Afghanistan Pakistan India (Gas Pipeline Project)*
9.	UNDP	: *United Nations Development Programme*

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel *halaman*

1. Surat Tugas 154
2. Daftar Riwayat Hidup 155

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani Perjanjian Doha, tentang penarikan pasukan internasional dari Afghanistan yang dimulai pada bulan Mei 2021. Sebagai balasannya, Taliban setuju untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan menahan diri untuk tidak menyerang pasukan Amerika Serikat dan tidak mengancam kota-kota besar di Afghanistan, tetapi hanya selama Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menarik pasukannya sesuai batas waktu perjanjian (The White House, 2023). Kemudian, pada April 2021, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) memutuskan untuk menarik semua pasukan Sekutu dari Afghanistan dalam beberapa bulan ke depan.

Hingga pada Agustus 2021, Taliban kemudian merebut kendali atas pemerintahan Afghanistan setelah penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan NATO dari negara tersebut (Suharto & Apriyani, 2022: 35-36). Taliban kemudian mengumumkan nama resmi pemerintahan negara mereka dengan sebutan Islamic Emirate of Afghanistan (IEA). Sebelum pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban, nama resmi Afghanistan yang diakui oleh dunia adalah Islamic Republic of Afghanistan.

Ketika pasukan Taliban pertama kali menguasai Afghanistan dari tahun 1996 hingga tahun 2001, hanya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang

memberikan pengakuan secara resmi kepada pemerintahan mereka. Namun pada perebutan kekuasaan yang kedua kalinya oleh Taliban pada 2021, belum ada satupun negara yang secara resmi melakukan hal tersebut (Rubin, 2021: 2). Oleh karena itu, dengan terjadinya peristiwa pengambilalihan pemerintahan Afghanistan ini, belum ada satu pun negara yang memberi pengakuan secara resmi atau de jure terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Pengakuan terhadap pemerintah merupakan indikasi kesiapan suatu pemerintah untuk menjalin hubungan resmi yang normal dengan pemerintah lain. Istilah pengakuan juga dapat diartikan sebagai wujud pendirian pemerintah yang mengakui status hukum pemerintah lain. Namun, pengakuan tidak secara objektif menetapkan status hukum suatu pemerintah, melainkan hanya merupakan pernyataan subjektif mengenai status tersebut.

Secara umum, terdapat dua bentuk pengakuan, yakni pengakuan de jure dan pengakuan de facto. Pengakuan de jure terhadap pemerintahan mengacu pada pengakuan formal suatu pemerintah untuk mengadakan hubungan secara normal dengan pemerintahan lain sebagai otoritas yang sah dan berdaulat di wilayahnya. Sementara itu, pengakuan de facto merujuk pada pengakuan tidak resmi atau tidak formal oleh negara-negara atau entitas lain terhadap suatu pemerintahan yang diberikan karena adanya fakta bahwa suatu pemerintahan mempunyai kendali efektif atas masyarakat dan wilayahnya. (Talmon, 2001: 99-140).

Pengakuan terhadap negara dan pemerintahan lebih bersifat deklaratif daripada konstitutif. Sehingga, kriteria dalam pemberian pengakuan dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan. Namun, terdapat satu kriteria yang pada umumnya

dapat disetujui secara universal, yaitu persyaratan kontrol efektif atas suatu wilayah. Adapun, nilai-nilai politik tertentu dapat dijadikan kriteria dalam pemberian pengakuan.

Karena pengakuan merupakan tindakan unilateral, maka pada prinsipnya negara bebas untuk menetapkan persyaratan apa pun. Meskipun negara-negara mungkin menganggap perlu untuk mengikuti asas-asas hukum tertentu dalam memberikan pengakuan, praktik dari negara-negara umumnya menunjukkan bahwa tindakan pengakuan pada hakikatnya masih dianggap sebagai suatu keputusan politik yang diputuskan oleh masing-masing negara sesuai dengan penilaian bebasnya terhadap suatu situasi (International Organization, 1950).

Gambar 1.1. Sikap Komunitas Internasional terhadap Pengakuan Pemerintahan Taliban di Afghanistan



Sumber: Olahan Penulis, 2024

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional tertinggi tidak memiliki wewenang untuk memberikan pengakuan terhadap suatu negara ataupun pemerintahannya. Pengakuan terhadap suatu negara atau pemerintahan baru merupakan suatu tindakan yang hanya dapat diberikan atau ditolak oleh negara dan pemerintahan lain (United Nations, 2024). PBB menekankan bahwa untuk mendapatkan pengakuan, pemerintah Taliban harus memenuhi komitmen yang dibuat dengan komunitas internasional, termasuk menjaga hak-hak perempuan, membentuk pemerintahan yang inklusif, dan mematuhi kewajiban internasional.

Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menetapkan persyaratan tertentu dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban. Persyaratan tersebut di antaranya yakni kepatuhan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap perempuan, dan pemerintahan yang inklusif. Amerika Serikat menilai bahwa terdapat kemunduran yang signifikan pada hak-hak perempuan akibat peraturan yang semakin membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, pemerintah Taliban mengeluarkan dekrit yang bertentangan dan tidak sejalan dengan kewajiban Afghanistan berdasarkan konvensi internasional (U.S. Department of State, 2023). Hal ini yang menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Sementara itu, Tiongkok pada Desember 2023 telah menerima secara resmi Duta Besar pemerintah Taliban untuk Tiongkok dan ini menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama yang menerima Duta Besar pemerintah Taliban sejak peristiwa pengambilalihan pada 2021 (Gul, 2023). Meskipun demikian, Tiongkok

masih belum memberikan pengakuan secara resmi terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin menyatakan bahwa Tiongkok tetap berpegang pada tuntutan lama, bahwa untuk mendapatkan pengakuan resmi, pemerintah Taliban harus membentuk pemerintahan yang inklusif, menerapkan kebijakan yang moderat, dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi terorisme.

Di sisi lain, pada 2023, Rusia melalui Utusan Khusus untuk Afghanistan, Zamir Kabulov mengatakan bahwa pengakuan terhadap pemerintahan Taliban akan menjadi kemungkinan yang realistis apabila pemerintah Taliban mengindahkan seruan komunitas internasional untuk menerapkan struktur politik yang inklusif. Struktur seperti itu akan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah lain, termasuk masalah hak asasi manusia, memastikan hak-hak perempuan, dan pada akhirnya membuka jalan bagi proses pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Alih-alih mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, Rusia justru fokus pada peningkatan hubungan perdagangan, ekonomi, dan diplomatik (Anadolu Agency, 2023).

Salah satu negara yang pernah mengakui pemerintahan Taliban sebelumnya pada 1996 hingga 2001, sekaligus merupakan negara tetangga Afghanistan, yakni Pakistan, melalui Menteri Informasi dan Penyiaran, Fawad Chaudhry menyatakan bahwa pengakuan rezim Taliban akan menjadi keputusan regional yang diambil setelah berkonsultasi dengan kekuatan regional dan internasional, ia menekankan bahwa Pakistan tidak bermaksud mengambil keputusan sepihak dalam hal ini. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan juga menyatakan bahwa mereka

mewaspadai tekanan internasional yang merugikan jika Pakistan menjadi negara pertama di dunia yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan (Asian News International, 2022).

Dengan melihat pernyataan-pernyataan dari komunitas internasional yang dalam hal ini sebutan komunitas internasional mengacu pada negara-negara yang memiliki peran signifikan, baik di tingkat global maupun regional, terutama yang memiliki kepentingan terkait dengan isu pengakuan pemerintahan Taliabn , dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut mempunyai sikap yang serupa akan syarat yang harus dipenuhi pemerintahan Taliban untuk memperoleh pengakuan internasional. Pemerintahan yang inklusif, menjaga hak asasi manusia terutama hak-hak perempuan, memerangi terorisme dan narkoba, serta kepatuhan terhadap norma ataupun konvensi internasional secara garis besar menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Taliban untuk mendapatkan pengakuan.

Dengan melihat sikap dari komunitas internasional yang serupa tentang pengakuan terhadap pemerintahan Taliban melalui tuntutan-tuntutan yang diberikan, hal ini direspons Taliban melalui Juru Bicaranya, Zabihullah Mujahid yang mengklaim bahwa pemerintah Taliban telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan internasional (Gul, 2022). Mujahid menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan hambatan terbesar dalam hal pengakuan global dan menghalangi negara lain untuk secara resmi menerima pemerintahan baru Afghanistan. Ia menyatakan bahwa semua negara, termasuk Amerika Serikat, harus memahami bahwa komitmen politik dan pengakuan terhadap pemerintah Taliban adalah demi kepentingan bersama dam memungkinkan dunia untuk

mendiskusikan keluhan komunitas internasional terhadap pemerintah Taliban (Ariana News, 2022b).

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa pemerintahan Taliban tidak mendapatkan status pengakuan secara de jure. Hal in dapat dilihat dengan tidak adanya satupun negara yang memberikan pengakuan secara resmi kepada pemerintah Taliban dan melalui pernyataan-pernyataan dari para petinggi Taliban. Walaupun demikian, status pemerintahan Taliban dapat dikatakan sebagai pemerintahan de facto, yang artinya pemerintah Taliban memiliki kendali efektif atas Afghanistan serta dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di negaranya.

Tidak adanya pengakuan internasional menyebabkan pemerintah Taliban terisolasi dari forum global seperti PBB. Ini menghalangi kemampuan pemerintah Taliban untuk menggunakan jalur diplomatik formal untuk berkomunikasi dengan komunitas internasional dan memperjuangkan kepentingannya secara legal di tingkat global. Taliban tidak dapat mengutus perwakilan tetap untuk PBB dari utusan yang mereka kehendaki. Taliban telah menunjuk Suhail Shaheen, Juru Bicara Kantor Politik IEA di Doha, sebagai perwakilan tetap PBB di New York. Namun, permintaan Taliban tidak diterima oleh Komite Kredensial PBB, sehingga Nasir Amad Faiq, yang ditunjuk oleh pemerintahan Afghanistan sebelumnya, yang dipimpin oleh presiden Ashraf Ghani, akan terus mewakili Afghanistan di PBB (The Express Tribune, 2023).

Terkait utusan pemerintah Taliban untuk PBB yang tidak diterima, Shaheen menyatakan bahwa pemerintah Taliban ingin menyampaikan pesan mereka kepada dunia melalui PBB, menjelaskan posisi mereka tentang berbagai isu yang dihadapi

rakyat Afghanistan. Selain itu, apabila terdapat masalah yang perlu diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui perundingan dan negosiasi. Oleh karena itu, sangat penting agar hak rakyat Afghanistan tidak dirampas, termasuk hak untuk memiliki kursi perwakilan di PBB (Mepa News, 2021).

Selain tidak diberikannya kursi bagi perwakilan Taliban di PBB, dampak tidak diakuinya pemerintah Taliban adalah diberikannya sanksi oleh komunitas internasional terhadap Taliban. PBB menjatuhkan sanksi utama terhadap pemerintah Taliban berupa pembatasan perjalanan internasional terhadap pemimpin-pemimpin Taliban, pembekuan aset, dan embargo senjata. Selain itu, International Monetary Fund (IMF) menangguhkan akses pemerintah Taliban ke sumber daya IMF, termasuk sekitar $440 juta cadangan moneter baru, hal ini dilakukan karena adanya tekanan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga melakukan upaya untuk mencegah pemerintah Taliban mengakses dana dengan membekukan lebih dari $7 miliar cadangan pemerintah Afghanistan yang disimpan di Federal Reserve Bank of New York (Voice of America, 2022).

Sanksi yang diberikan kepada pemerintah Taliban kemudian menyebabkan krisis ekonomi dan memperparah krisis kemanusiaan yang ada di Afghanistan. Seperti yang disampaikan Amir Khan Muttaqi, Pelaksana Menteri Luar Negeri IEA yang menyatakan bahwa penyebab utama krisis ekonomi yang sedang berlangsung adalah pemberlakuan sanksi dan pembatasan perbankan oleh Amerika Serikat. Hal ini menghambat dan menunda upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Pembatasan pada sistem perbankan di Afghanistan juga telah

memberatkan para investor dalam menjalankan bisnis mereka, sehingga hal ini menyebabkan lonjakan harga komoditas di Afghanistan (Government Media and Information Center of IEA, 2022).

Secara keseluruhan, tidak diakuinya pemerintahan Taliban telah menciptakan tantangan besar bagi stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat Afghanistan. Pemerintah Taliban yang tidak diakui secara resmi oleh mayoritas negara-negara dunia menyebabkan pemerintah Taliban menghadapi isolasi diplomatik. Ini membatasi interaksi pemerintah Taliban dengan komunitas internasional dalam forum-forum global dan menutup jalur diplomasi formal untuk negosiasi dan kerjasama. Tidak adanya pengakuan formal juga membuat Afghanistan tidak dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya (Mepa News, 2021).

Selain itu, sanksi internasional yang dikenakan terhadap pemerintahan Taliban memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Afghanistan. Sanksi ini menyebabkan krisis ekonomi yang meluas dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Afghanistan. Akses terhadap aset yang dibatasi menghalangi pemerintah Taliban untuk mengakses dana penting yang dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi. Krisis ini semakin diperparah dengan sanksi yang dikenakan terhadap individu dan entitas yang terhubung dengan Taliban yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan bisnis di luar negeri (The World Bank, 2022). Oleh karena itu, dengan tidak diakuinya pemerintah Taliban secara garis besar berdampak pada terisolasinya kemampuan diplomatik Taliban dalam

forum internasional, menyebabkan krisis ekonomi, serta krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan.

Dalam merespons dampak-dampak dari tidak diakuinya pemerintahan Taliban tersebut, penerapan kebijakan luar negeri merupakan cara yang ditempuh oleh pemerintah Taliban. Kebijakan luar negeri merupakan sikap, keputusan, maupun tindakan suatu negara dalam sistem internasional guna memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan diri di lingkungan luar batas wilayahnya (Affianty, 2015). Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Taliban dalam dunia internasional dapat dilihat melalui sikap, tindakan, dan interaksi dalam sistem internasional ataupun pernyataan yang ditunjukkan.

Pemerintah Taliban telah merumuskan kebijakan luar negeri dalam merespons dampak-dampak dari tidak diakuinya pemerintahan Taliban dengan beberapa langkah utama yang diambil, yaitu dengan melakukan pendekatan diplomatik dengan negara-negara lain, serta melakukan kerja sama ekonomi antar negara. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya Taliban untuk memperoleh legitimasi internasional dan memperkuat stabilitas ekonomi di tengah keterbatasan pengakuan resmi. Meskipun tantangan masih besar, pendekatan ini mencerminkan strategi adaptif Taliban dalam menghadapi dinamika politik global.

Melakukan pendekatan diplomatik dengan negara-negara lain merupakan langkah kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Taliban guna memperoleh pengakuan serta mengatasi terisolasinya pemerintah Taliban dalam forum-forum internasional akibat status pemerintahan yang tidak diakui. Pelaksana Menteri Luar Negeri IEA mengatakan bahwa pemerintah Taliban telah memiliki

hubungan dagang dengan negara-negara tetangga, sehingga Afghanistan maupun negara-negara tersebut saling mengutus diplomatnya di masing-masing negara. Muttaqi mengatakan bahwa kehadiran para diplomat antar negara ini sudah merupakan bentuk dari pengakuan tersendiri, meskipun negara-negara tersebut belum secara resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap pemerintahan Taliban (Ariana News, 2023).

Selain itu, dalam mengatasi krisis ekonomi dan krisis kemanusian yang dihadapi Afghanistan karena sejumlah sanksi yang diberikan oleh komunitas internasional, pemerintah Taliban melakukan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain. Muttaqi menyatakan bahwa perluasan hubungan dagang dengan negara-negara regional dan menghubungkan kawasan melalui perdagangan merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri IEA. Ia menambahkan bahwa kebijakan luar negeri IEA berorientasi pada ekonomi. Pemerintah Taliban ingin meningkatkan volume perdagangan dan transit, melaksanakan proyek-proyek ekonomi regional yang besar, serta menarik investasi. Muttaqi mengatakan bahwa memfasilitasi proses bisnis dan menciptakan infrastruktur modern merupakan salah satu program terpenting IEA (Government Media and Information Center of IEA, 2023).

Terkait berbagai tuntutan yang dilayangkan oleh komunitas internasional sebagai syarat pengakuan terhadap pemerintah Taliban terutama mengenai hak-hak perempuan yang dianggap oleh komunitas internasional belum dipenuhi oleh Taliban, direspons oleh pemerintah Taliban melalui petinggi-petinggnya. Pemimpin Tertinggi IEA, Haibatullah Akhunzada menuturkan bahwa pemerintah

Taliban menghormati dan berkomitmen terhadap semua hak-hak syariah, baik laki-laki dan perempuan. Selain itu, ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak menggunakan isu kemanusiaan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik (Al Emarah English, 2022).

Melalui petinggi Taliban lainnya, Zabihullah Mujahid yang merupakan Juru bicara IEA menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan Taliban sama sekali tidak mengandung unsur diskriminasi. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kepentingan agama dan budaya, serta Taliban berkomitmen terhadap semua hak masyarakatnya. Mujahid memperjelas bahwa hal tersebut adalah masalah internal Afghanistan yang tidak menimbulkan masalah bagi siapa pun dan harus dihormati oleh semua pihak. Kemudian, pada kesempatan lain, Muttaqi mempertegas bahwa komunitas internasional perlu menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan pemerintah Taliban, sambil menghormati kedaulatan dan integritas teritorialnya (Muttaqi, 2023).

Dengan melihat sejumlah kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons kondisi pemerintahan yang tidak diakui, dapat dilihat bahwa Taliban menunjukkan keterbukaan dalam melakukan hubungan diplomatik dan kerja sama antar negara maupun berinteraksi dengan komunitas internasional. Namun, keterbukaan tersebut tidak begitu saja membuat Taliban patuh terhadap sejumlah tuntutan komunitas internasional yang tidak sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka. Kebijakan luar negeri yang diterapkan pemerintah Taliban ini tentunya dihasilkan dengan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Maka dari itu, faktor-faktor apa saja yang berperan dan berpengaruh dalam membentuk kebijakan luar

negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban menjadi fokus utama yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori *Foreign Policy Decision-Makin*g yang dikemukakan oleh Richard Snyder untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban. Dalam teori ini terdapat dua faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri, yaitu *internal setting* dan *external setting*. Hal ini menjadikan teori ini sebagai teori yang relevan dalam menganalisis topik yang diangkat dalam penelitian ini, karena dalam teori ini secara khusus menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri terbentuk dengan melihat sejumlah faktor.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman secara mendalam mengenai rangkaian kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah Taliban sebagai respons terhadap statusnya yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Kebijakan luar negeri Afghanistan akan diteliti secara mendalam dengan melihat faktor-faktor apa saja yang terlibat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan informasi yang empiris dan faktual melalui berbagai sumber yang kredibel sehingga menghasilkan output yang komprehensif dan konkret.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pengambilalihan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban menimbulkan perhatian dari komunitas internasional atas ketidakstabilan politik yang terjadi di Afghanistan.
2. Pemerintah Taliban di Afghanistan tidak mendapatkan pengakuan internasional karena dianggap belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh komunitas internasional, sehingga pemerintah Taliban merespons hal tersebut melalui kebijakan luar negerinya.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pembentukan kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons kondisi tidak diberikannya pengakuan internasional terhadap pemerintahannya. Peneliti akan memberikan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi dalam terbentuknya kebijakan luar negeri Afghanistan. Fokus rentang waktu dalam penelitian ini adalah pada saat dimulainya pemerintahan Taliban berkuasa pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan penjabaran terkait permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal memengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons status pemerintahan yang tidak diakui secara internasional tahun 2021- 2023?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang terlibat dan berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons status pemerintahan yang tidak diakui secara internasional tahun 2021-2023.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam merespons status pemerintahan yang tidak diakui secara internasional pada 2021-2023. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ataupun melengkapi aspek-aspek lainnya yang belum pernah diteliti dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat menambah cakupan informasi dan pengetahuan mengenai isu yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang mempelajari studi yang berkaitan dalam mengkaji faktor-faktor yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara sekaligus isu mengenai Taliban di Afghanistan. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga

dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa Hubungan Internasional terkait isu Taliban di Afghanistan maupun studi terkait kebijakan luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kemajuan dan perkembangan bidang studi yang terkait.